



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI V DPR RI DALAM RANGKA
PENINJAUAN KESIAPAN INFRASTRUKTUR DAN
TRANSPORTASI MUDIK LEBARAN TAHUN 2023
KE PROVINSI JAWA TIMUR

TANGGAL 30 MARET – 01 APRIL 2023



KOMISI V DPR-RI
JAKARTA, 2023

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

I.1. Dasar Hukum	3
I.2. Maksud dan Tujuan.....	4
I.3. Lokasi dan Waktu	4
I.4. Agenda Kunjungan.....	5

II. HASIL PENINJAUAN LAPANGAN

6

II.1. Temuan, Permasalahan dan usulan di Lapangan	6
II.2. Kesimpulan/Rekomendasi.....	9

III. PENUTUP

10

LAMPIRAN

11

Dokumentasi Kegiatan	11
----------------------------	----



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI V DPR RI DALAM RANGKA PENINJAUAN KESIAPAN
INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI MUDIK
LEBARAN TAHUN 2023 KE PROVINSI JAWA TIMUR
TANGGAL 30 MARET – 01 APRIL 2023**

=====

I. PENDAHULUAN

Secara umum, sesuai survey yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan secara nasional pada Lebaran 2023 sebesar 45,8% dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 123,8 Juta orang. Perlu diantisipasi perjalanan melalui moda darat karena merupakan 75% dari total seluruh perjalanan, dengan persentasi Mobil Pribadi 22,07%, Sepeda Motor 20,30% dan Bus 18,39%.

Bila tidak diantisipasi, bisa menimbulkan masalah lalu lintas terkait meningkatnya kasus kecelakaan, kemacetan, dan menimbulkan ketegangan antara sesama pengendara/ penumpang hingga jatuh korban.

Oleh karena itu, pemerintah dan operator transportasi, serta stakeholder lainnya, perlu meningkatkan aspek pencegahan (*preventif*) daripada fokus di aspek penanganan (*kuratif*) pada penyelenggaraan angkutan Lebaran 2023.

I.1. Dasar Hukum

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23.
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 98 ayat (4) huruf f.
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020

Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pasal 7 huruf d; dan

4. Keputusan Rapat Intern Komisi V DPR RI.

I.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Propinsi Jawa Timur ini adalah untuk mengetahui kesiapan Pemerintah di sektor infrastruktur dan transportasi dalam menyambut mudik Lebaran tahun 2023.

Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi dan Tugas Dewan sesuai dengan Pasal 59, ayat (4), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu:

butir a. *melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;*

butir d. *Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.*

Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 60 ayat (3) juga menyatakan bahwa: "Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat:"

butir f *mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.*

I.3. Lokasi dan Waktu

Lokasi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ini di Propinsi Jawa Timur, khususnya pertemuan di Exit Tol Gending, pada tanggal 30 Maret – 01 April 2023, yang dipimpin oleh Bapak Roberth Rouw (Pimpinan Komisi V/F-P NASDEM).

I.4. Agenda Kunjungan

Beberapa agenda kegiatan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI RI ke Propinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Operator Transportasi Nasional, Badan Usaha Jalan Tol, dan *stakeholders* untuk membahas tentang persiapan Infrastruktur dan Transportasi mudik Lebaran tahun 2023, yang dilaksanakan di exit Tol Gending Probolinggo.
2. Peninjauan Jalan Tol Surabaya – Probolinggo.
3. Peninjauan Stasiun Wono Kromo, Surabaya.

II. HASIL PENINJAUAN LAPANGAN

II.1. Temuan, Permasalahan dan Usulan di lapangan

Beberapa temuan dan permasalahan yang diperoleh dari Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka peninjauan kesiapan Infrastruktur dan Transportasi mudik lebaran tahun 2023 di Propinsi Jawa Timur:

II.1.1. Kementerian PUPR

- 1) **Ruas tol Pasuruan-Probolinggo masih perlu pembenahan**, sebelum dioperasikan pada 15 April 2023, Pemerintah beserta Badan Usaha Jalan Tol tersebut, perlu mempersiapkan jalur dengan baik, termasuk:
 - **Kemantapan Kondisi Jalan**, khususnya terkait perkerasan jalur utama yang masih bergelombang, drainasenya belum ada, median, bahu jalan, dan hal teknis lainnya perlu dilengkapi.
 - **Prasarana keselamatan dan keamanan** seperti belum ada **penerangan Jalan Umum**, petunjuk jalan, pagar ruang milik Jalan, pagar pengaman, fasilitas penanganan kecelakaan, fasilitas pengamanan dan penegakan hukum, dan segala sesuatu yang menunjang keselamatan dan keamanan.
 - **Prasarana pendukung layanan** antara lain terkait belum ada unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan, tempat istirahat dan pelayanan yang belum siap, dan segala sesuatu yang mendukung layanan Jalan Tol, termasuk kecepatan **waktu tanggap dalam penanganan hambatan lalu lintas**.
- 2) Perlu **antisipasi kemacetan Tol dalam kota Surabaya**, oleh karena itu, perlu koordinasi yang intens antara Pemerintah, BUJT dan Korlantas Polri, sehingga tidak menimbulkan penumpukan kendaraan, rekayasa lalu lintas agar tidak ada penumpukan kendaraan di kawasan penyempitan (*bottleneck*).
- 3) Percepatan **perbaikan ruas Jalan Nasional di wilayah Jawa Timur**, termasuk koordinasi pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum untuk keselamatan dan keamanan arus mudik.
- 4) Perlu **memperhatikan hambatan samping**, misalnya kendaraan

parkir di pinggir jalan, baik Jalan Nasional maupun Jalan Tol, yang akan menimbulkan kemacetan dan kecelakaan. Perlu ada ketegasan dalam pengaturan lalu lintas sehingga kelancaran angkutan Lebaran 2023 berjalan lancar, aman dan selamat.

- 5) **Mensiagakan peralatan** untuk mengantisipasi penanganan potensi bencana.

II.1.2. Kementerian Perhubungan

- 1) Di stasiun Wonokromo, Ditjen Perkeretaapian perlu berkoordinasi dengan PT. KAI untuk menyiapkan **lahan/gedung parkir bagi kendaraan mobil atau motor bagi penumpang**, apalagi stasiun ini terletak di daerah yang padat arus lalu lintas.
- 2) Kementerian Perhubungan perlu berkoordinasi dengan operator transportasi, seperti PT Pelni, PT ASDP, PT. KAI terkait **pengajuan izin untuk penambahan/penyesuaian jadwal kapal/kereta api**. Selain itu perlu **peningkatan sosialisasi penjualan tiket online** agar tidak terjadi penumpukan penumpang di semua simpul transportasi, baik pelabuhan, stasiun, terminal, dll.
- 3) Peningkatan **pengawasan** oleh Kementerian Perhubungan terhadap operator transportasi agar aspek keselamatan dalam sistem manajemen transportasi menjadi prasyarat pertama. Hal ini penting agar keselamatan tidak diabaikan demi aspek aksesibilitas dan mobilitas, yang penting penumpangnya terangkut, keselamatan dinomorduakan. Pengawasan sebagai langkah awal tidak ada lagi kapal yang terbakar, kelebihan muatan, dan keselamatan kendaraan umum/bus antar kota.
- 4) Perlu disediakan **Posko Lebaran untuk pemeriksaan kondisi pengemudi mobil**, termasuk upaya pemeriksaan kesehatan di *rest area* atau di terminal, termasuk pengaturan terkait lamanya kendaraan ada di

rest area, supaya tidak terjadi penumpukan di *rest area* tersebut.

- 5) Untuk menjamin keselamatan berlayar maka perlu diingkatkan **pengawasan terhadap ketersediaan alat-alat keselamatan** di setiap kapal penyeberangan, dan memastikan penggunaannya sesuai prosedur keselamatan dalam berlayar.
- 6) **Akses pembelian tiket kapal penyeberangan** di Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk masih perlu dipermudah, mengingat banyaknya masyarakat yang belum memahami pembelian tiket secara *online*. Terkait dengan hal ini, sosialisasi akses tiket secara *online* harus ditingkatkan, agar lebih banyak calon penumpang yang dapat membeli secara *online*.

II. 2. Rekomendasi dan Kesimpulan

Beberapa kesimpulan/rekomendasi yang diperoleh dari Kunjungan Kerja Spesifik ke Propinsi Jawa Timur ini adalah sebagai berikut:

- 1) Propinsi Jawa Timur merupakan salah satu propinsi yang akan menjadi daerah tujuan mudik Lebaran 2023. Oleh karena itu, Komisi V DPR RI meminta Pemerintah untuk melakukan pengendalian transportasi dan peningkatan pengawasan dalam pengelolaan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2023 demi mendukung aspek keselamatan, kenyamanan dan keamanan angkutan Lebaran tahun 2023.
- 2) Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan dalam penyelenggaraan angkutan mudik Lebaran tahun 2023 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) memastikan kelaikoperasian sarana angkutan di semua moda dan keberlanjutan (sustainabilitas) pelayanan angkutan selama masa angkutan Lebaran 2023;
 - b) meningkatkan koordinasi dengan operator transportasi nasional terkait penyelenggaraan angkutan Lebaran; dan
 - c) mengoptimalkan pengawasan terhadap fluktuasi harga tiket.
- 3) Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR dalam penyelenggaraan mudik Lebaran tahun 2023 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) meningkatkan upaya preservasi di Jalan Tol Trans Jawa dan Jalan Naional di wilayah Jawa Timur;
 - b) meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana Tempat Istirahat dan Pelayanan (*rest area*) pada jalur-jalur mobilitas lebaran; dan
 - c) menyiagakan peralatan untuk penanganan bencana.
- 4) Komisi V DPR RI meminta Pemerintah untuk bersikap tegas dan konsisten dengan tetap mengedepankan kemanusiaan terkait aspek keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi angkutan Lebaran 2023.

III. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan kesiapan Infrastruktur dan transportasi mudik Lebaran tahun 2023 di Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI akan menjadikan laporan ini sebagai data/informasi yang akan disampaikan dalam Rapat dengan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI.

KETUA TIM,

ttd

ROBERTH ROUW

No: A-405

LAMPIRAN
Dokumentasi





